

EFEKTIFITAS PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN KARAWANG

Oleh
Rahmat Hasbullah, SE., M.Pd

PENDAHULUAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas peran komite sekolah dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah di kabupaten Karawang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan efektifitas peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Karawang Tahun 2009

LANDASAN TEORI

1. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini UU **Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 34** yang menyatakan bahwa:
 - a) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
 - b) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. **PP RI No 48 Tahun 2008** Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 yang meyakakan bahwa:
 - a) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - b) Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan
3. **Definisi Peran** sebagaimana diungkap oleh Abu Ahmadi (1982;50) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sementara itu Bilton, et al. (1981; 18) menyatakan, peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang actor, maksudnya orang yang memiliki posisi-posisi atau status status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah "naskah" (scripts) sudah disiapkan untuk mereka. Dilain pihak menurut Horton dan Hunt (1993; 129), seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

Untuk menghindari konflik tersebut maka diperlukan suatu aturan yang jelas, maka dalam kaitannya dengan peran Komite Sekolah sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 56, ayat 3 bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan merujuk UU di atas sebagaimana yang dijelaskan dalam **Keppmendiknas No. 044/U/2002 dalam lampiran No. II**, setidaknya dijabarkan 3 hal yang menjadi tujuan pembentukan Komite Sekolah, yaitu:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
- b) Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut lebih lanjut kemudian dijelaskan peran dan fungsinya sebagai berikut:

PERAN KOMITE SEKOLAH

- a) Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
- b) Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*)
- c) Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*)
- d) Sebagai mediator

FUNGSI KOMITE SEKOLAH

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/ organisasi/ dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
 - e) Kebijakan dan program pendidikan
 - f) Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
 - g) Rencana Anggaran Pendidikan dan
 - h) Belanja Sekolah (RAPBS)
 - i) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - j) Kriteria tenaga kependidikan

- k) Kriteria fasilitas pendidikan
 - l) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
 - m) Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan
 - n) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
 - o) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. **Efektifitas Kerja** dalam penelitian ini sebagaimana dimaksud S.P. Siagian (1997;151) yang mengungkapkan bahwa efektifitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya, apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu, sementara itu Mauled Mulyono (1993;4), mengemukakan dalam pengertian produktivitas, efektifitas kerja adalah hasil luaran atau hasil pelaksanaan kerja.

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan efektifitas peran komite sekolah adalah ketepatan tujuan yang ingin dicapai atas tingkah laku yang diharapkan terhadap komite sekolah sesuai kedudukannya dalam pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dapat terpenuhi

METODE PENELITIAN

1. **Unit analisis:** seluruh komite sekolah **sekolah dasar (SD)** penerima dana BOS tahun 2009 di kabupaten karawang sejumlah **511 orang**, yang terdiri dari **36** kecamatan di kabupaten karawang
2. **Sampel penelitian** menggunakan *stratified random sampling* dengan tingkat kesalahan 15% pada *jumlah sub populasi yang berbeda* sehingga didapatkan sampel sebanyak: **73 orang**
3. **Metode penelitian:** deskriptif
4. **Sumber data/ instrumen :** kuesioner (angket)
5. Adapun untuk keperluan **analisis informasi** dalam penelitian ini, maka yang dimaksud dengan peran dan fungsi komite sekolah adalah keseluruhan aspek sebagaimana yang dijelaskan dalam kepmendiknas no. 044/U/2002 dalam lampiran no. II, dimana skor didapatkan dari jawaban responden terhadap indikator yang menyatakan: ya diberikan skor 1, sedangkan untuk jawaban responden yang menyatakan: tidak diberi skor 0
6. **Untuk keperluan penafsiran dan penyimpulan hasil** kemudian dilakukan pentahapan pekerjaan yang dimulai dari penafsiran berdasarkan data dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil jawaban responden, yang kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi, tabulasi dan display data dalam bentuk tabel dan grafik yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk diketahui efektifitas peran komite sekolah dalam pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 73 orang responden didapatkan hasil sebagai berikut:

1. DEMOGRAFI RESPONDEN

Tabel 3
Rekapitulasi Demografi Responden

No	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	Jabatan	Lama menjabat	Jumlah Pengurus
1	1	3	4	2	3	2
2	1	5	4	1	3	1
3	1	6	4	1	4	2
4	1	6	4	1	4	2
5	1	4	2	1	4	1
6	1	4	2	1	2	2
7	1	6	2	1	2	2
8	1	2	6	1	4	2
9	1	2	6	1	3	2
10	1	3	4	1	4	2
11	1	4	4	1	4	2
12	1	4	2	1	4	2
13	1	4	2	1	3	1
14	1	3	4	2	4	2
15	1	4	2	1	4	2
16	1	4	2	1	4	2
17	1	3	7	1	4	2
18	1	6	4	1	4	1
19	1	1	2	1	4	1
20	1	1	2	1	4	1
21	1	2	4	1	3	1
22	1	1	1	1	4	1
23	1	3	4	1	4	2
24	1	3	2	1	2	1
25	1	4	2	1	4	2
26	1	1	2	1	4	2
27	1	6	1	1	2	1
28	1	2	4	2	4	2
29	1	6	2	1	2	1
30	1	5	4	2	3	2
31	2	5	4	1	3	2
32	1	3	4	1	4	2
33	1	4	3	1	4	1
34	1	6	2	1	4	2
35	1	4	4	1	4	2
36	2	2	6	3	4	2
37	1	4	2	1	3	2
38	1	1	2	1	3	2
39	1	4	4	1	3	2

No	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	Jabatan	Lama menjabat	Jumlah Pengurus
40	1	1	2	1	4	2
41	1	3	4	1	4	2
42	1	4	4	1	2	2
43	1	1	3	1	4	2
44	1	5	6	3	3	2
45	1	2	6	1	4	2
46	1	4	4	1	4	2
47	1	6	6	1	3	2
48	1	4	2	1	4	2
49	1	1	2	1	3	2
50	1	6	2	1	4	2
51	2	2	6	4	4	2
52	1	1	5	1	2	2
53	1	4	4	4	2	2
54	1	2	7	1	4	2
55	2	4	4	4	1	2
56	2	6	3	1	2	2
57	1	4	2	1	3	1
58	1	2	5	4	4	2
59	1	3	5	1	4	1
60	1	3	4	2	3	2
61	1	5	4	1	3	1
62	1	6	4	1	4	2
63	1	6	4	1	4	2
64	1	4	2	1	4	1
65	1	4	2	1	2	2
66	1	6	2	1	2	2
67	1	4	2	1	3	2
68	1	1	2	1	3	2
69	1	4	4	1	3	2
70	1	1	2	1	4	2
71	1	3	4	1	4	2
72	1	4	4	1	2	2
73	1	1	3	1	4	2

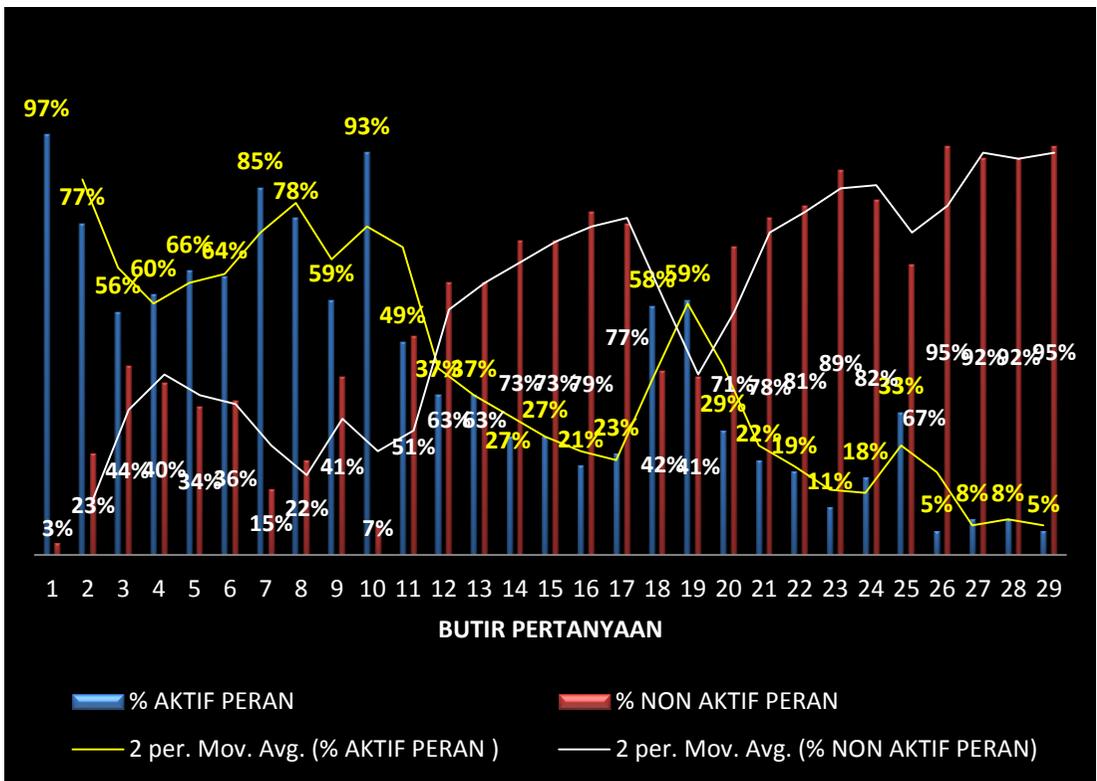
Keterangan:

No	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	Jabatan	Lama menjabat	Jumlah Pengurus
1.	Laki-laki	Petani	Tidak Sekolah/Tidak Lulus SD	Ketua	0 s/d 1 tahun	1 s/d 2 anggota
2.	Perempuan	Pns	SD/ Ibtidaiyah	Sekretaris	=> 1 th s/d 3 tahun	> 2 anggota
3.		Pensiunan	SMP/ Tsanawiyah	Bendahara	=> 3 tahun s/d 5 tahun	
4.		Wiraswasta	SMA/ Aliyah	Anggota	=> 5 tahun	

5.	Swasta	Diploma/ D2-D4	0 s/d 1 tahun
6.	Lainnya	Sarjana/ S1	=> 1 th s/d 3 tahun

2. PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BOS

a) Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan Tertutup Peran Komite Dalam Pengelolaan



b) Rekapitulasi Jawaban Pertanyaan Terbuka Peran Komite Dalam Pengelolaan Dana BOS

i. PERAN PEMBERI PERTIMBANGAN

Menyangkut peran pertimbangan tentang apakah mereka pernah mendapatkan informasi, pelatihan pengelolaan dana BOS, dan persepsi mereka tentang dana BOS, didapatkan jawaban sebagai berikut:

Mereka pada umumnya memperoleh informasi dana BOS dari Media Masa, Sosialisasi Dinas Pendidikan dan penjelasan dari pihak sekolah. Seluruh Ketua Komite Sekolah yang ditemui pernah mendapatkan pelatihan BOS 2009 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat.

Persepsi mereka bahwa program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan untuk memberikan DIKDAS yang lebih bermutu, membeli buku dan meniadakan pungutan dari sekolah.

ii. PERAN PEMBERI DUKUNGAN

Tentang peran mereka dalam memberi dukungan, seperti frekuensi kehadiran dalam rapat Penyusunan RAPBS/ RKAS pada tahun ajaran 2009/2010, pihak-pihak yang menghadiri, frekuensi kehadiran dalam rapat pengesahan (pleno) RAPBS/ RKAS pada tahun ajaran 2009/2010, pihak-pihak yang menghadiri, pengetahuan komite tentang Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), keterlibatan komite dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), dan frekuensi kehadiran mereka dalam RPS, didapatkan jawaban sebagai berikut:

Sebagian besar komite hanya diundang antara 1 s/d 2 Kali selama tahun 2009/2010 untuk membahas RAPBS dan RPS sekaligus, yang biasanya dilaksanakan pada saat pembagian rapot siswa, pihak-pihak yang menghadiri selain komite adalah sebagian besar adalah orang tua siswa, kepala sekolah, dan guru, ada 3 orang komite menyatakan bahwa sekolah tersebut juga mengundang tokoh masyarakat dan aparat desa. Hampir separuh dari komite tidak pernah diajak untuk menghadiri rapat pengesahan (pleno) RAPBS/RAKS selama tahun 2009/2010. Walaupun mereka menandatangani RAPBS mereka tidak mencermati RAPBS sebelum menandatangani. umumnya hal ini terjadi karena mereka tidak memahami isi dari RAPBS dimaksud. Walaupun mereka mengetahui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), pada umumnya mereka tidak diajak atau terlibat dalam penyusunan RPS.

iii. PERAN PENGAWASAN

Pada umumnya (53 orang) Komite Sekolah tidak pernah menerima salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bos yang dikirim sekolah ke Dinas Pendidikan setempat yang konsekuensinya maka mereka tidak pernah memeriksa laporan tersebut serta tidak mengklarifikasi/ meminta penjelasan atas laporan tersebut karena tidak pernah dibahas dalam rapat internal sekolah, sehingga Komite Sekolah tidak mengetahui secara rinci Realisasi Penggunaan Dana BOS oleh pihak Sekolah walaupun sebagian besar mereka mengetahui bagaimana cara menghitung Dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah. Sebagian besar (57 orang) Komite Sekolah yang kami wawancarai tidak pernah menerima salinan laporan keuangan oleh pihak sekolah. Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana peran pengawasan mereka lakukan, umumnya mereka hanya diharuskan sekolah untuk menandatangani Format BOS K2. Hampir Semua sekolah yang disurvei sebagian kecil menempelkan informasi BOS pada papan pengumuman yang diletakan di Ruang Kepala Sekolah ataupun di Ruang TU/Guru dan sebagian besar yang lain bahkan tidak menempelkannya di tempat yang dapat terlihat dikarenakan alasan sedang diperbaiki datanya, dan umumnya informasi yang dimuat adalah informasi tentang Format BOS K2/ Format BOS 11B (rincian penggunaan dana secara umum).

iv. PERAN MEDIASI

Menyangkut peran mediasi komite sekolah sejak adanya program BOS semua sekolah responden tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, adapun hal - hal yang menghambat mereka untuk berpartisipasi pada umumnya dikarenakan mereka segan dengan kepala sekolah dan sudah mempercayakan sepenuhnya pada sekolah.

PEMBAHASAN

Sebagaimana dipaparkan pada awal bab V tentang data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan selama penelitian, informasi tersebut menunjukkan gambaran nyata tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS 2009, lebih lanjut pada bagian ini akan dianalisis fakta – fakta yang terjadi berdasarkan hasil analisis pada bagian A, sebagai berikut:

Untuk menjawab perumusan masalah tentang bagaimanakah efektifitas peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS tahun 2009, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. **Peran Pemberi Pertimbangan**, sebagian besar komite sekolah **telah menunjukkan perannya** dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran yang ditunjukkan menunjukkan besaran 70% dari indikator peran telah dilaksanakan, ini dimungkinkan dari pengetahuan Komite sekolah yang sudah cukup baik ini ditunjukkan dari 97% (71 orang) responden mengetahui informasi dana BOS dan 77% (56 orang) diantaranya telah mengikuti pelatihan BOS, adapun menyangkut pemahaman mereka, diatas 50% dari mereka mengetahui manfaat penggunaan dana BOS dengan benar, walaupun 15% (11 orang) dari mereka menganggap dengan adanya dana BOS cukup merepotkan bagi mereka.
2. **Peran Pemberi Dukungan**, Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya** secara optimal dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran menunjukkan hanya besaran sekitar 59% dari keseluruhan indikator peran yang harus dilaksanakan, ini mungkin disebabkan karena: 1) latar belakang pendidikan responden dimana 46% adalah lulusan SD dan SMP dimana 4% diantaranya bahkan tidak lulus SD, 2) Sebagian besar (57 orang) komite hanya diundang antara 1 s/d 2 Kali selama tahun 2009/2010 untuk membahas RAPBS dan RPS sekaligus, 3) Hampir separuh (30 orang) dari komite tidak pernah diajak untuk menghadiri rapat pengesahan (pleno) RAPBS/RAKS selama tahun 2009/2010, 4) 46 orang komite tidak diajak atau terlibat dalam penyusunan RPS, sehingga berakibat mereka tidak memahami isi dari RAPBS maupun RPS dimaksud.
3. **Peran Pengawasan**, Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya secara optimal** dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran menunjukkan hanya besaran sekitar 29% dari keseluruhan indikator peran yang harus dilaksanakan, ini mungkin disebabkan karena tidak transparannya pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS, ini dapat dibuktikan dari: 1) 53 orang Komite Sekolah menyatakan tidak pernah menerima salinan maupun memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Bos yang dikirim sekolah ke Dinas Pendidikan setempat, 2) 58 orang menyatakan LPJ tidak pernah dibahas dalam rapat internal sekolah, 3) hanya 42 orang komite sekolah yang mengetahui cara perhitungan maupun realisasi penggunaan dana BOS, 4) Umumnya Komite sekolah hanya diharuskan sekolah untuk menandatangani Format BOS K2, 5) Hampir Semua sekolah yang disurvei sebagian kecil menempelkan informasi BOS pada papan pengumuman yang diletakan di Ruang Kepala Sekolah ataupun di Ruang TU/Guru dan sebagian besar yang lain bahkan tidak menempelkannya di tempat yang dapat terlihat dikarenakan alasan sedang diperbaiki datanya.
4. **Peran Mediasi**, Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya secara optimal** dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran menunjukkan hanya besaran sekitar 8% dari keseluruhan indikator peran yang harus dilaksanakan, ini mungkin dikarenakan: 1) sejak adanya program BOS semua sekolah responden tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, 2) keseganan dan fakto kepercayaan sepenuhnya Komite sekolah terhadap kepala sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dihasilkan beberapa kesimpulan berkaitan dengan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS 2009 yaitu:

1. Peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS 2009, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 34 ayat 2, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 dalam lampiran No. II yang menjabarkan lebih lanjut tentang peran tersebut yang terdiri dari, peran pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, pengawasan dan mediasi.
2. Berdasarkan hasil analisis terkait **peran pemberi pertimbangan**, komite sekolah telah berhasil secara optimal dalam melaksanakan perannya, hal ini didasarkan pada hasil wawancara, dimana 56 orang dari 73 responden (**77%**) **pernah mengikuti pelatihan, diatas 63% dari mereka mengetahui peruntukkan penggunaan dana BOS dan 97% memperoleh informasi** tentang BOS baik dari Dinas Pendidikan, Sekolah maupun dari sumber-sumber informasi lainnya, dan 85% responden diantaranya menyebutkan bahwa dengan adanya dana BOS sama sekali tidak merepotkan mereka.
3. Berdasarkan hasil analisis **peran pemberi dukungan** Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya** secara optimal dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran menunjukkan hanya besaran sekitar 59% dari keseluruhan indikator peran yang harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan dari ke-6 indikator peran tersebut hanya 3 peran yang dilaksanakan secara maksimal (diatas rata-rata) yaitu, menghadiri rapat penyusunan RAPBS/RKAS (78%), dan menghadiri rapat pleno pengesahan RAPBS/RKAS (59%) dan menandatangani (93%), sementara ke-3 peran lainnya, seperti mencermati isi RAPBS/RKAS, mengetahui rencana pengembangan sekolah, dan keterlibatan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah, masih dibawah rata-rata.
4. Berdasarkan hasil analisis **peran pengawasan** Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya** secara optimal dalam bagian ini, ini ditunjukkan dari hasil wawancara maupun rekapitulasi pada tabel 8 dimana rerata keseluruhan peran menunjukkan hanya besaran sekitar 29% dari keseluruhan indikator peran yang harus dilaksanakan, hal ini dikarenakan dari ke-12 indikator peran tersebut hanya 2 peran yang dilaksanakan secara maksimal (diatas rata-rata) yaitu, mengetahui realisasi penggunaan dana BOS (58%), mengetahui cara penghitungan dana BOS (59%), sementara ke-10 peran lainnya masih dilaksanakan dibawah rata-rata.
5. Peran Mediasi Komite sekolah terlihat **belum menunjukkan perannya** secara optimal dalam bagian ini, dikarenakan sejak adanya dana BOS pihak komite sekolah tidak lagi melakukan peran mediasinya antara sekolah dan orang tua murid khususnya dalam membantu pembiayaan operasional sekolah dengan alasan bahwa semua hal tersebut sudah tercover dalam BOS.

Dengan demikian, jika ke empat peran komite sekolah sebagaimana yang diamanatkan Kepmendiknas No. 044/U/2002 **tidak dilaksanakan seluruhnya secara optimal**, maka peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS 2009 di kabupaten Karawang **belum terlaksana secara efektif**

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dihasilkan beberapa saran berkaitan dengan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS 2009 yaitu:

1. Pelatihan, sumber – sumber dan saluran informasi yang disediakan dan dilaksanakan oleh pemerintah berkenaan dengan dana BOS dalam rangka pemberdayaan komite sekolah dalam menjalankan **peran pertimbangannya**, saat ini perlu dipertahankan dan dilakukan secara berkala sehingga masyarakat maupun komite sekolah selalu ter *updated* informasi mereka berkaitan dengan pengelolaan dana BOS dan *well informed*, hal ini penting untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan peran pemberi pertimbangan dengan benar.
2. Sementara itu untuk **mendorong optimalisasi peran pemberi dukungan, pengawasan dan mediasi**, maka diperlukan proses seleksi yang **cukup ketat** dalam perekrutan anggota komite sekolah berkaitan dengan **latar belakang pendidikan, masa jabatan komite, kejelasan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan tanggung jawab** komite sekolah dalam sebuah **aturan yang jelas** dari pemerintah sebagai landasan hukum komite sekolah dalam melaksanakan perannya untuk mendorong adanya **aspirasi, partisipasi, prakarsa dan tanggung jawab** dari masyarakat dapat terlaksana secara efektif, sehingga diharapkan suasana dan kondisi **transparan, akuntabel, dan demokratis** dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang **bermutu** di sekolah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Bilton, Tony, Kevin Bonnet, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, dan Andrew Webster, 1981. *Introductory Sociology*. Hong Kong: The Macmillan Press, Ltd.,
- Henry Simamora, 2003, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Ed 3, Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Ed.6, Jakarta: Erlangga.
- Jusuf, Almasdi, 1996, *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Malayu Hasibuan, 1996, *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah*, Edisi 2, Jakarta: Toko Gunung Agung,
- Malayu Hasibuan, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mathis L. Robert and Jackson John H, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Jimmy Sadeli, Jakarta: Salemba Empat.
- Mc Dougal Arden Marianne and Tolley Dawling Barbara, 1997, *Bussines Concepts*, 3rd Ed, Boston: Heinle & Heinle Publisher.
- Merton, Robert. 1968. *Social Theory and Social Structure*, 2nd ed.. New York: Free Press, hlm. 41-45, sebagaimana dikutip dalam John E. Farley. 1992. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Pemerintah RI, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang – Depdiknas
- _____, 2004, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang – Depdiknas
- Robin Stephen P, 1991, *Organizational Behavior*, 5th Ed, New Jersey: Prentice Hall int.
- T. Hani Handoko, 2003, *Manajemen*, Ed 2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.